

Hasil Penelitian

KONSEP DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN “KAMPUNG BEASISWA” PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

(*CONCEPT AND DESIGN OF NORTH SUMATERA GOVERNMENT’S SCHOLARSHIP VILLAGE*)

R. Sabrina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Medan Timur, Medan
Sumatera Utara - Indonesia
Email: raja_sabrina@yahoo.com

Diterima: 30 Agustus 2021; Direvisi: 20 September 2021; Disetujui: 30 September 2021

ABSTRAK

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kualitas sumberdaya manusia, sehingga peningkatan derajat pendidikan masyarakat perlu dilakukan. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dimuat salah satu misi yaitu Bermartabat dalam Pendidikan, dan salah satu prioritas pembangunannya adalah Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara relatif rendah. APK Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah 25,76 dan APM Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 22,20. Hal ini berkaitan pula dengan angka putus sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah tingkat atas (SMA dan SMK). Angka putus sekolah Sumatera Utara Tahun 2020 untuk tingkat SMA sebesar 0,43 dan SMK sebesar 1,10. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara terbatas dengan responden yang dipilih secara acak dari siswa, orangtua siswa, guru dan dari masyarakat umum. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, rilis/buku dan referensi lainnya dari berbagai sumber atau instansi. Data dianalisis dan dikaji secara deskriptif untuk memperoleh gambaran kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendasari penyusunan konsep dan rancangan “Kampung Beasiswa”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat yang putus sekolah umumnya disebabkan kurang mampu membayar biaya pendidikan dan kurang memperoleh informasi tentang beasiswa, baik mengenai sumber-sumber beasiswa maupun cara mengaksesnya. Untuk itu perlu memberi bantuan pendidikan berupa Beasiswa dan mendekatkan akses terhadap beasiswa tersebut bagi siswa, untuk mendukung mereka dapat melanjutkan pendidikannya hingga S1 bahkan S2 dan S3. Hal ini dijawab dengan konsep dan rancangan Kampung Beasiswa, yang dikonsepsi menjadi pusat informasi beasiswa; dukungan pelatihan bahasa Inggris; dan fasilitasi bagi siswa calon penerima beasiswa dengan pemberi atau sumber-sumber beasiswa, dengan merancang segala sesuatu kebutuhannya. Konsep dan rancangan ini dapat dijadikan petunjuk teknis pembangunan Kampung Beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: pendidikan, APK dan APM, beasiswa, konsep dan rancangan

ABSTRACT

Education is an important element in the quality of human resources, so that it is necessary to increase the degree of community education. The North Sumatra Province RPJMD 2019-2023 contains Dignity in Education as a mission, and one of its development priorities is the Improvement and Fulfillment of Access to Education. The Government of North Sumatra plans that the community can receive education up to the level of higher education. The Gross Enrollment Rate (APK) and Net Enrollment Rate (APM) of Higher Education in North Sumatra are relatively low. The APK and APM of Higher Education in North Sumatra in 2020 are 25.76 and 22.20, respectively. This is also related to the dropout rate, especially at the high school level (SMA and SMK). The dropout rate for North Sumatra in 2020 for the SMA level is 0.43 and the SMK is 1.10. As a qualitative research, the data used were both secondary and primary data. Primary data were collected through

questionnaires and limited interviews with randomly selected respondents from students, parents, teachers and the general public. Secondary data were collected from documents, reports, releases/books and other references from various sources or agencies. The data were analyzed descriptively to obtain an overview of the existing conditions and problems to underlie the preparation of the concept and design of the "Scholarship Village". In this study, it was found that people who dropped out of school were generally due to their inability to pay tuition fees and lack of information about scholarships, the latter regarding the sources of scholarships and how to access them. For this reason, it is necessary to provide educational assistance in the form of scholarships and bring closer access to these scholarships for students, to support them to continue their education up to S1 and even S2 and S3. This was answered with the concept and design of the Scholarship Village, which was conceptualized as a scholarship information center; English language training support; and facilitation for students who are prospective scholarship recipients with scholarship providers or sources, by designing all their needs. These concepts and designs can be used as guidelines for the development of the Scholarship Village by the Government of North Sumatra.

Keywords: Education, APK and APM, Scholarships, Concept and design

PENDAHULUAN

Visi pembangunan Sumatera Utara yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat", dengan 5 misi. Salah satu misi tersebut adalah "Bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri".

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara, ditetapkan prioritas pembangunan Sumatera Utara, yaitu: 1) peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; 2) **peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan**; 3) pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 4) penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 5) peningkatan daya saing sektor agraris; 6) peningkatan daya saing sektor pariwisata; dan, 7) peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan Sumatera Utara tersebut, salah satu program prioritas pembangunan adalah Pendidikan, tepatnya Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan. Hal ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendasari upaya-upaya pencapaian tujuan sesuai target-targetnya, dengan mensolusi permasalahan yang ada. Dengan demikian peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dicapai sesuai tujuan yang diharapkan, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Utara, sehingga dapat pula meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara guna mendukung Sumatera Utara Bermartabat.

Sebagaimana diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari kondisi

Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi, dimana untuk kondisi Pendidikan, yaitu Dimensi Pengetahuan, Indikatornya adalah: (a) Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun; dan (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka HLS Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 13,23 tahun, berarti anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat Diploma I atau mengecap pendidikan hingga Perguruan Tinggi tingkat pertama.

Namun, RLS pada tahun yang sama adalah 9,54 yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas telah menamatkan sekolah tingkat SMP atau menduduki SLTA tahun pertama (kelas 10). Sementara angka partisipasi sekolah yang dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sumatera Utara juga masih relatif rendah, terutama APK dan APM Perguruan Tinggi.

Menurut BPS (2021), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah 31,14, artinya jumlah penduduk yang kuliah (tanpa melihat usia) hanya 31,14% dari jumlah penduduk usia kuliah (19-24 tahun). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 22,20, artinya jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang kuliah hanya 22,20% dari jumlah penduduk usia kuliah (19-24 tahun).

Tabel 1 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Utara dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia juga relatif rendah, dengan menduduki urutan ke-21. Tabel 2 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi se-Indonesia.

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020.

No.	Kabupaten/Kota	APK		APM	
		Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi
		2019	2020	2019	2020
1	Nias	12,67	14,95	5,85	10,52
2	Mandailing Natal	16,54	16,74	13,09	15,15
3	Tapanuli Selatan	27,59	28,50	15,34	17,95
4	Tapanuli Tengah	20,66	25,27	15,63	17,99
5	Tapanuli Utara	24,35	24,77	17,71	20,73
6	Toba	11,78	10,65	2,57	4,88
7	Labuhan Batu	12,69	12,77	10,82	11,43
8	Asahan	21,41	21,19	15,20	19,14
9	Simalungun	26,65	27,18	20,07	21,31
10	Dairi	13,06	14,18	9,48	12,97
11	Karo	15,59	15,53	10,53	12,51
12	Deli Serdang	26,62	26,12	19,77	22,60
13	Langkat	17,57	19,58	13,13	18,50
14	Nias Selatan	16,70	16,50	10,86	14,27
15	Humbang Hasundutan	17,40	15,26	10,30	10,96
16	Pakpak Barat	13,39	14,99	8,27	8,64
17	Samosir	15,05	16,43	3,60	0,86
18	Serdang Bedagai	13,17	15,21	9,67	12,44
19	Batubara	16,19	16,06	10,89	15,78
20	Padang Lawas Utara	11,86	10,20	7,10	7,67
21	Padang Lawas	15,29	15,85	10,93	15,85
22	Labuhanbatu Selatan	15,99	14,92	11,02	12,62
23	Labuhanbatu Utara	13,77	18,78	12,51	18,78
24	Nias Utara	17,47	15,36	7,81	8,76
25	Nias Barat	12,08	11,49	5,94	7,70
26	Sibolga	21,50	22,10	9,23	10,53
27	Tanjung Balai	13,87	14,46	10,04	9,50
28	Pematang Siantar	35,92	35,48	23,11	24,88
29	Tebing Tinggi	16,43	16,18	11,81	14,17
30	Medan	44,40	43,89	33,54	40,26
31	Binjai	30,59	32,00	20,40	25,70
32	Padang Sidempuan	37,88	40,17	29,64	30,14
33	Gunung Sitoli	27,17	24,91	19,75	19,54

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Posisi APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Utara diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia yang menempati urutan ke-21, sudah selayaknya ditingkatkan. Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yaitu untuk Program Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan guna mencapai misi “Bermartabat dalam Pendidikan,” Pemerintah Sumatera Utara merencanakan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Sumatera Utara ke depan dapat melanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dinyatakan bahwa meningkatkan akses anak umur 6-21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat SLTA dan untuk mencegah putus

sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.

Permasalahan putus sekolah umumnya karena ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan. Hasil penelitian terdahulu mendapati bahwa faktor dominan putus sekolah adalah tidak mampu membiayai pendidikan atau faktor ekonomi. Dewi, dkk. (2014) menyatakan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orangtua, (3) faktor fasilitas pembelajaran, (4) faktor minat anak bersekolah, (5) faktor budaya, dan (6) faktor lokasi sekolah. Selanjutnya Prihatin Pebriana (2011) dalam Dewi, dkk. (2014) menyebutkan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi se-Indonesia Tahun 2019 dan 2020.

No.	Provinsi	2019	2020
1	DI Yogyakarta	73,14	74,69
2	Maluku	47,65	48,62
3	Sulawesi Tenggara	47,56	47,40
4	Aceh	44,51	44,58
5	Maluku Utara	44,02	43,97
6	Sumatera Barat	42,18	43,09
7	Sulawesi Selatan	42,72	42,69
8	DKI Jakarta	39,43	40,34
9	Sulawesi Tengah	38,64	39,32
10	Kalimantan Timur	37,78	39,16
11	Bengkulu	37,63	38,39
12	Gorontalo	36,71	37,74
13	Bali	35,96	36,46
14	Papua Barat	34,83	35,30
15	Riau	33,93	35,07
16	Sulawesi Utara	33,86	34,61
17	Banten	33,22	33,07
18	Jambi	30,71	31,42
19	Nusa Tenggara Barat	30,70	31,28
20	Nusa Tenggara Timur	30,22	31,28
21	SUMATERA UTARA	30,82	31,14
22	Jawa Timur	29,20	29,52
23	Sulawesi Barat	30,85	29,44
24	Kalimantan Selatan	27,04	27,35
25	Kepulauan Riau	25,11	26,68
26	Sumatera Selatan	25,59	26,41
27	Jawa Barat	25,15	25,75
28	Kalimantan Tengah	25,45	25,70
29	Kalimantan Barat	24,87	25,36
30	Lampung	21,98	23,08
31	Kalimantan Utara	23,43	22,71
32	Jawa Tengah	21,80	22,62
33	Papua	21,08	21,87
34	Bangka Belitung	14,27	14,73
	INDONESIA	30,28	30,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Penelitian Muhammad Firman (2009) dalam Dewi, dkk. (2014) menyatakan bahwa faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab paling dominan putus sekolah. Begitu pula penelitian Asmara & Sukadana (2016) mendapati bahwa pendapatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk anak putus sekolah. Untuk itu menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan bantuan di bidang pendidikan berupa beasiswa atau bantuan biaya sekolah lainnya.

Hasil penelitian Wassahua (2016) menyimpulkan bahwa penyebab dominan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan keluarga membiayai pendidikan, disamping faktor-faktor lainnya seperti faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Mudjito (2008) dalam Wassahua (2016) menyatakan bahwa penyebab putus sekolah adalah rendahnya kemampuan ekonomi dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi tidakmampuan tersebut adalah dengan memberi dan/atau memfasilitasi bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan disebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan untuk sub-urusan bidang manajemen pendidikan yaitu: a) Kewenangan Pemerintah Pusat adalah penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; b) Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan, c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, maka untuk memajukan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus membantu biaya pendidikan/beasiswa bagi penduduknya yang berusia sekolah SD dan SMP, mengupayakannya dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lain, guna memastikan tidak ada anak usia tersebut di daerahnya yang tidak sekolah. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Provinsi harus mengupayakan hal yang sama untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah SLTA bersekolah di SLTA.

Angka Putus Sekolah tingkat SLTA Sumatera Utara tahun 2020 yaitu SMK 1,10 dan SMA 0,43. Dalam rangka mencegah putus sekolah sekaligus meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mensolusi masalah tersebut dengan mendorong dan memfasilitasi siswa untuk dapat melanjutkan sekolah hingga Perguruan Tinggi setingkat S1, S2 dan S3. Hal ini dimungkinkan bila dirancang langkah-langkah konkrit penyiapan beasiswa untuk itu.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun perencanaan pembangunan suatu wadah yang merupakan *one stop center* segala sesuatu mengenai Beasiswa, yang disebut “Kampung Beasiswa”, berupa konsep dan rancangan yang dapat menjawab atau mensolusi permasalahan yang ada. Konsep dan rancangan ini juga harus bersifat implementatif sehingga akan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat Sumatera Utara

Maka konsep dan rancangan tersebut akan menjadi dasar atau pedoman dalam rangka pembangunan Kampung Beasiswa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disusun konsep dan rancangan yang memuat panduan tentang: pengertian Kampung Beasiswa; sumber-sumber pemberi dan calon penerima beasiswa; kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan di Kampung Beasiswa; keperluan ruangan beserta peralatan dan meubelernya; kebutuhan personil pengelola dan struktur organisasinya; lokasi; *lay out*/tata ruang area; dan langkah-langkah implementasinya.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara terbatas dengan responden yang dipilih secara acak dari siswa, orangtua siswa, guru dan dari masyarakat umum. Kuesioner disampaikan secara langsung di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu, dan penyebaran melalui *google form* selama 5 hari yang mendapat respon dari Kabupaten/Kota: Langkat, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Karo, Toba, Dairi, Pematang Siantar, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Asahan, Sibolga, Gunung Sitoli, Serdang Bedagai, juga Labuhan Batu, Medan dan Deli Serdang. Total responden mencapai 203 orang.

Wawancara dilakukan dengan metoda *sampling incidental* guna menggali lebih jauh permasalahan putus sekolah, beasiswa dan aksesibilitasnya. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, rilis/buku dan referensi lainnya dari berbagai sumber atau instansi. Data dianalisis dan dikaji secara deskriptif untuk memperoleh gambaran kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendasari penyusunan konsep dan rancangan suatu area atau wadah dimana permasalahan yang terjadi akan disolusi, yang diberi nama “Kampung

Beasiswa”. Selanjutnya, dalam menyusun konsep dan rancangan dimaksud menggunakan daya kreasi penulis (*self creation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dalam penelitian ini yang berjumlah 203 orang terdiri atas: siswa (37,93 %), orangtua siswa (13,79 %), guru (12,32 %), dan masyarakat umum (35,96 %). Masyarakat umum terdiri atas PNS, karyawan, wirausaha, mahasiswa. Laki-laki 45,32 % dan Perempuan 54,68 %. Usia 18 tahun ke bawah 33,50 %, usia 19-25 tahun 26,11 %, usia 25-40 tahun 21,18 %, usia 40-60 tahun 18,23 % dan usia 61 tahun keatas 0,98 %.

Anak putus sekolah baik SD maupun SMP dan SLTA di daerah ini tergolong “Sedikit” yang mana Responden yang menjawab bahwa siswa putus sekolah di daerahnya “Sedikit” ada sebanyak 65,03 %, walaupun responden yang menjawab bahwa siswa putus sekolah di daerahnya “Banyak” ada sebesar 30,54 % dan menjawab “Sangat Banyak” 4,43 %. Hal ini relevan bila dilihat dari data Angka Partisipasi Sekolah Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 97,73 %, berarti masih ada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Sedangkan Angka Putus Sekolah Sumatera Utara tahun 2020 yaitu: SD 0,19, SMP 0,40, SMA 0,43, SMK 1,10.

Umumnya atau 62,56 % Responden menyatakan bahwa anak putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah, sedangkan 37,44 % lainnya menyatakan karena tidak mau melanjutkan sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu bahwa faktor dominan anak putus sekolah adalah ketidakmampuan membiayai pendidikan atau faktor ekonomi (Dewi, dkk., 2014; Prihatin Pebriana, 2011 dalam Dewi, dkk., 2014; Muhammad Firman, 2009 dalam Dewi, dkk., 2014; Asmara & Sukadana, 2016; Wassahua, 2016; Mudjito, 2008 dalam Wassahua, 2016).

Masalah ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membayar biaya sekolah sebenarnya sudah disadari sejak lama sehingga pemerintah dan berbagai pihak menyediakan beasiswa. Banyak sumber-sumber beasiswa yang informasinya disebar umumnya melalui media internet/web dan mudah untuk diakses. Namun hasil penelitian ini mendapati bahwa informasi mengenai ketersediaan Beasiswa ternyata hanya sebagian kecil masyarakat di daerah ini yang mengetahui ada Beasiswa dari berbagai sumber yaitu 26,60 %, sedangkan yang tidak tahu sejumlah 18,23 % dan umumnya atau yang terbesar yaitu 55,17 % menyatakan mendengar sepintas lalu tentang adanya Beasiswa dari berbagai sumber tetapi tidak tahu secara jelas kepastiannya. Bila pun tahu atau diberitahu

tentang adanya beasiswa tersebut, 70,90 % menyatakan tidak tahu mengaksesnya dan hanya 21,18 % yang menyatakan tahu mengaksesnya, sedangkan 7,88 % tidak menjawab.

Dari hasil wawancara pula didapati bahwa secara realita bahwa penerima Beasiswa kebanyakan dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, walaupun tidak semuanya. Hal ini karena mereka lebih banyak dan lebih cepat mendapatkan informasi dan mampu mengaksesnya, juga mempunyai kemampuan bahasa asing dan komputer yang lebih mahir serta relatif memiliki fasilitas pendukung untuk memperolehnya.

Sementara itu, Motivasi masyarakat/siswa untuk melanjutkan sekolah sebenarnya sangat tinggi bila biaya sekolah tersedia, dimana hal ini ditunjukkan oleh 87,19 % responden menyatakan bahwa siswa sangat ingin melanjutkan sekolah, meskipun 12,81 % responden menjawab kurang ingin melanjutkan sekolah.

Berkaitan dengan kemampuan siswa SLTA dalam menguasai Bahasa Inggris, yang menyatakan "Sangat Mampu" hanya 1,48 %, "Mampu" 21,18 %, "Kurang mampu" 74,38 % dan "Tidak mampu" 2,96 %. Sementara dalam hal kemampuan siswa SLTA mengoperasikan komputer, umumnya menyatakan "Kurang mampu" (50,74 %), sedangkan yang menyatakan "Sangat mampu" 3,94 %, yang Mampu 43,35 %, dan yang Tidak mampu 1,97 %.

Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban memastikan penduduk Sumatera Utara berusia sekolah setingkat SLTA dapat bersekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengingat bahwa kejadian anak putus sekolah pada umumnya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan; masyarakat/siswa kurang mengetahui informasi ketersediaan Beasiswa dari berbagai sumber dan kurang mampu mengaksesnya, sedangkan berdasarkan penelusuran dokumen/referensi bahwa sumber-sumber beasiswa banyak tersedia dan dapat diakses dengan mudah; dan kemampuan siswa SLTA berbahasa Inggris yang kurang memadai; maka perlu disiapkan upaya penyediaan beasiswa dan dukungan lainnya agar siswa SLTA dapat melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi, untuk level S1, bahkan S2 dan S3.

Dalam rangka merancang penyediaan Beasiswa untuk S1, S2 dan S3, perlu diperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada. Menyangkut pemberi dan penerima Beasiswa, berdasarkan data yang dikumpulkan, kondisi

Sumber/Pemberi Beasiswa dan Pencari Beasiswa digambarkan sebagai berikut.

Pertama, Dari sisi sumber/pemberi beasiswa: Sebenarnya banyak sumber atau pemberi beasiswa, tetapi kurang terinformasi secara luas dan merata ke masyarakat terutama di daerah; informasi tersebut seperti terserak atau tidak terhimpun dan kurang promosi/publikasi; seakan sumber tersebut sedikit karena banyak yang luput dari pengetahuan masyarakat; sehingga hanya diketahui atau dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang (sayangnya) sebagian besar adalah masyarakat perkotaan dan berpenghasilan menengah ke atas, yang sebenarnya mampu untuk membiayai sendiri. Untuk itu perlu menginventarisir, mendokumentasikan, membuat sistem data basis dan mempublikasikannya ke semua SLTA.

Kedua, Dari sisi pencari/calon penerima beasiswa: Banyak anak-anak bertalenta dan berprestasi yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan lebih tinggi/lanjut; mereka juga kurang memperoleh informasi beasiswa dari sumber-sumber pemberi beasiswa, beserta persyaratan, prosedur dan waktunya; mereka relatif kurang mampu berbahasa Inggris yang merupakan bekal utama dan persyaratan wajib, terutama untuk beasiswa ke luar negeri. Untuk itu perlu peningkatan pengetahuan mengenai sumber pemberi beasiswa dan penguatan kemampuan bahasa Inggris.

Dari kondisi pertama dan kedua di atas, maka perlu suatu wadah menghimpun dan memfasilitasi bertemunya kedua hal tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana membangun wadah tersebut yang dinamakan dengan KAMPUNG BEASISWA. Guna merealisasi maksud tersebut, maka disusun **Konsep dan Rancangan KAMPUNG BEASISWA** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini.

Pengertian Kampung Beasiswa.

Pengertian tentang nomenklatur Kampung Beasiswa perlu didefinisikan untuk menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan banyak pengertian (multi tafsir) atau salah pemahaman (*misunderstanding*). Kamus Besar bahasa Indonesia (*KBBI daring*) menyebutkan pengertian Kampung, yaitu: a) Kelompok rumah yang merupakan bagian Kota (biasanya dihuni oleh orang berpenghasilan rendah); b) Desa; Dusun; c) Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.

Menurut Wikipedia, (id.m.wikipedia.org) Kampung adalah: a) suatu daerah, dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang

bertempat tinggal di sana; b) merupakan pembagian administratif daerah yang terkecil, di bawah kecamatan; c) merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga; d) adalah sebuah aglomerasi permukiman; dan, e) *is a clustered human settlement or community larger than hamlet but smaller than a town.*

Kampung disamakan juga dengan Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Secara realita lapangan, kampung merupakan suatu area dimana berlangsung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan pembangunan. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh (Jumadi, 2012).

Berdasarkan pengertian Kampung dan Beasiswa di atas, dalam tulisan ini Kampung diartikan sebagai suatu wilayah/area dimana kegiatan kehidupan dan pembangunan berjalan. Dengan demikian, pengertian Kampung Beasiswa disini adalah suatu area dimana kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendapatkan beasiswa bagi masyarakat dijalankan.

Calon Penerima dan Sumber Beasiswa.

Calon Penerima Beasiswa adalah penduduk Sumatera Utara yang memerlukan Beasiswa untuk S1, S2 dan S3, dan memenuhi persyaratan. Sumber Beasiswa, antara lain: Lembaga Internasional; Negara-negara sahabat (Luar Negeri); Universitas/Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri; Kementerian Pendidikan RI (LPDP); Kementerian/Lembaga Dalam Negeri (Khusus untuk PNS); Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (untuk PNS/Masyarakat); dan, Perusahaan dan Lembaga Dalam Negeri.

Sumber beasiswa ini sangat banyak dan mudah diakses seperti dari *Indbeasiswa.com* dan lain-lain. Beberapa beasiswa yang tersedia antara lain: Beasiswa Universitas Multimedia Nusantara; King Abdulaziz University Scholarship; Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme untuk kuliah di Oxford University; Eiffel Scholarship dari Pemerintah Perancis; Beasiswa kuliah di Politeknik Manufaktur ASTRA dari PT> ASTRA;

Monbusho dan Monbukagakusho Scholarsip dari Pemerintah Jepang; Tech MBA Scholarship dari Tokopedia dan IE University Spanyol; University of Toronto Full Scholarship dari University of Toronto, Kanada; Beasiswa Keguruan Yasbil dari Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil; Holland Scholarship dari Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda; King Fahd University of Petroleum & Minerals Scholarship dari King Fahd University of Petroleum & Minerals Arab Saudi; Beasiswa Penuh Pemerintah Brunei Darussalam (BDGS); Beasiswa Penuh Pemerintah Turki; Fulbright Scholarship dari Pemerintah Amerika Serikat; Mitsui-Bussan Scholarship dari Mitsui & Co Ltd bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Islamic Development Bank Scholarship dari Islamic Development Bank; dan sangat banyak lagi sumber-sumber/pemberi beasiswa lainnya.

Kegiatan. Mengingat permasalahan utama putus sekolah adalah tidak mampu membayar biaya pendidikan, kurang mendapat informasi tentang sumber-sumber beasiswa dan kurang tahu mengaksesnya, serta kurangnya kemampuan Bahasa Inggris dan Komputer, maka kegiatan Kampung Beasiswa harus menjawab atau menjadi solusi masalah ini. kegiatan utama yang dilakukan di KAMPUNG BEASISWA adalah sebagai berikut.

Pertama, Informasi yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara: menginventarisasi Sumber Beasiswa, persyaratan dan waktunya; Menyiapkan Data Basis (Bank Data); dan, Menyiapkan Informasi dan Publikasi (Pusat Informasi). *Kedua*, mengadakan pelatihan yang dimulai dengan pengumuman dan seleksi calon peserta pelatihan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan bahasa Inggris dan komputer.

Ketiga, kegiatan administrasi dan fasilitasi berupa: Penatausahaan semua proses administrasi, keuangan dan program kerja unit/lembaga Kampung Beasiswa; Pengkoneksian Calon Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa; Fasilitasi Calon Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa; Penyiapan administrasi dan persyaratan bagi Penerima Beasiswa; Pembekalan Pra-Keberangkatan bagi Penerima Beasiswa; serta, Fasilitasi Pemberangkatan Penerima Beasiswa.

Kebutuhan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola. Untuk mengelola Kampung Beasiswa ini diperlukan personil dan penyusunan Struktur Organisasi lembaga sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan operasional Kampung Beasiswa. Personil yang dibutuhkan sebagai pengelola Kampung Beasiswa ini berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari: a) Pimpinan: 1 orang; b) Staf Bagian

Penyusunan Informasi dan Publikasi: 2 orang; c) Staf Bagian Administrasi dan Fasilitas: 2 orang; d) Resepsionis: 1 orang; e) Sekuriti: 1 orang; dan, f) Petugas Kebersihan: 1 orang. Struktur organisasi pengelola disajikan pada Gambar 1. Dengan catatan, untuk kegiatan pelatihan tidak ada personilnya secara permanen karena pelatihan dikerjasamakan dengan pihak lain (lembaga/universitas) yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut.

Kebutuhan Ruangan. Kebutuhan ruangan untuk menjalankan kegiatan Kampung Beasiswa ini sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasionalnya, yaitu: a) Ruang Resepsionis, Display dan Publikasi; b) Ruang Lobby, Pelayanan Informasi dan Konsultasi; c) Ruang Kerja Pimpinan dan Pegawai; d) Ruang Pelatihan; e) Ruang Laboratorium Bahasa (dibuat tersendiri); f) Ruang Perpustakaan; g) Ruang Rapat/Makan pegawai; h) Ruang Dapur/Pantry, Musholla dan Toilet; serta, i) Ruang Kafetaria.

Lokasi. Lokasi Kampung Beasiswa adalah di Gedung Hall A Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gator Subroto, Medan, Sumatera Utara. Kondisi eksisting disajikan pada Gambar 2.

Penataan Ruang/Lay-out dan Meubelernya. Kondisi Gedung yang diperuntukkan bagi lokasi Kampung Beasiswa memerlukan peralatan/meubelernya untuk setiap ruangan yang dibutuhkan dirancang sebagai berikut. Teras Depan membutuhkan: Meja kursi Sekuriti; Kursi tunggu tamu; Alat/bahan Protokol Kesehatan; Bunga/tanaman/dekorasi; dan, Tempat sampah.

Ruang Resepsionis membutuhkan: Meja kursi Resepsionis; Displai/bahan publikasi; Dekorasi; dan, Tempat sampah. Ruang Lobby, Pelayanan Informasi dan Konsultasi membutuhkan: Sofa tamu di Lobby; Meja kursi Pelayanan Informasi dan Konsultasi; Perangkat mengakses informasi mandiri; Rak meja bahan publikasi; Bahan publikasi; Dekorasi tanaman;

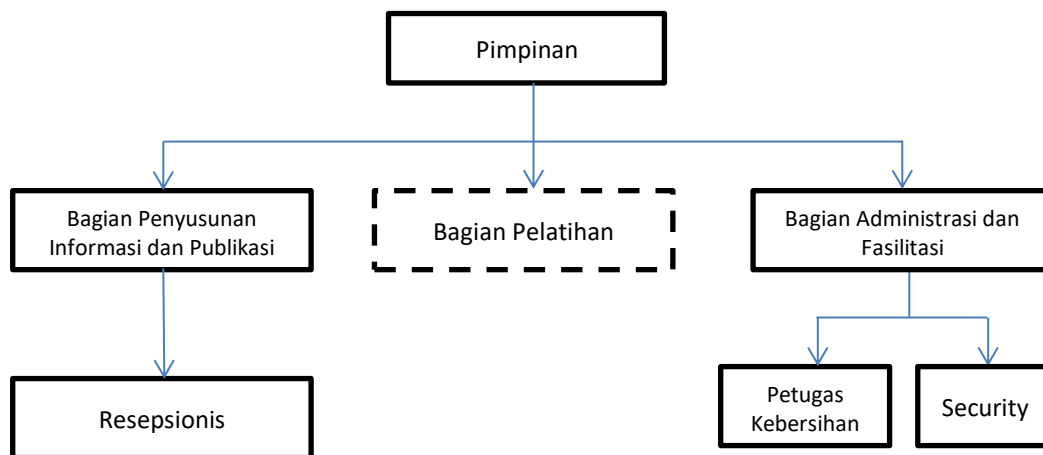
Tempat sampah; serta, Dispenser, Rak gelas dan Gelas.

Ruang kerja Pimpinan membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/Rak; Komputer; Sofa tamu; dan, Tempat sampah. Ruang Kerja Staf Bagian penyusunan Informasi dan Publikasi, membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/rak; Peralatan computer/IT; Internet; dan, Tempat sampah. Ruang Kerja Staf Bagian Administrasi dan Fasilitas, membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/rak; Komputer; dan, Tempat sampah.

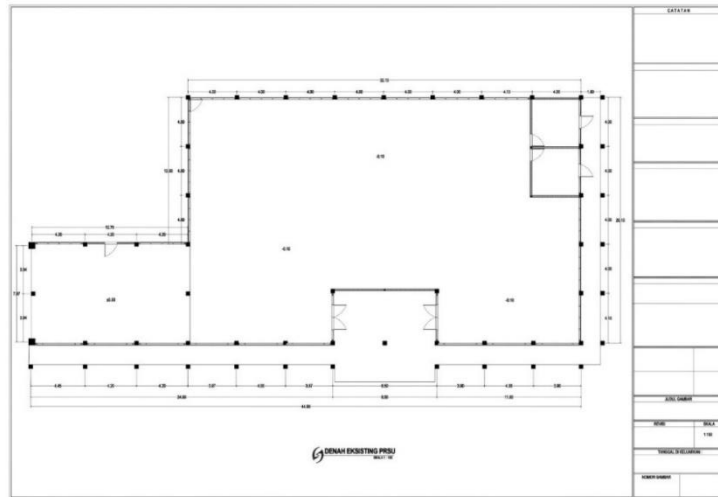
Ruang Pelatihan bahasa Inggris, membutuhkan: Meja kursi peserta pelatihan; Meja kursi Pengajar; Perangkat alat pelatihan *Sound system*; Rak/lemari; Dispenser, gelas dan tempat gelas; dan, Tempat sampah. Ruang Perpustakaan, membutuhkan: Lemari/rak buku referensi; Koleksi buku referensi; Koleksi audio/visual referensi; Perangkat pemutar audio/visual; Meja kursi; dan, Rak/alat katalog. Ruang Sholat dilengkapi dengan Karpet dan Sajadah.

Ruang Pantri, dilengkapi dengan: Tempat cuci; Meja; Rak alat/bahan makan minum; Dispenser; Piring gelas sendok; Sapu dan peralatan pel; serta, Tempat sampah. Ruang makan dan diskusi pegawai, dilengkapi dengan: Meja kursi makan serta Lemari/rak file. Toilet dan tempat wudhu, terdiri atas: Toilet Laki-laki; Toilet Perempuan; dan, Tempat wudhu. Lalu, Kafetaria yang dilengkapi dengan: Steling jualan makanan minuman; Meja kursi; serta, Dekorasi.

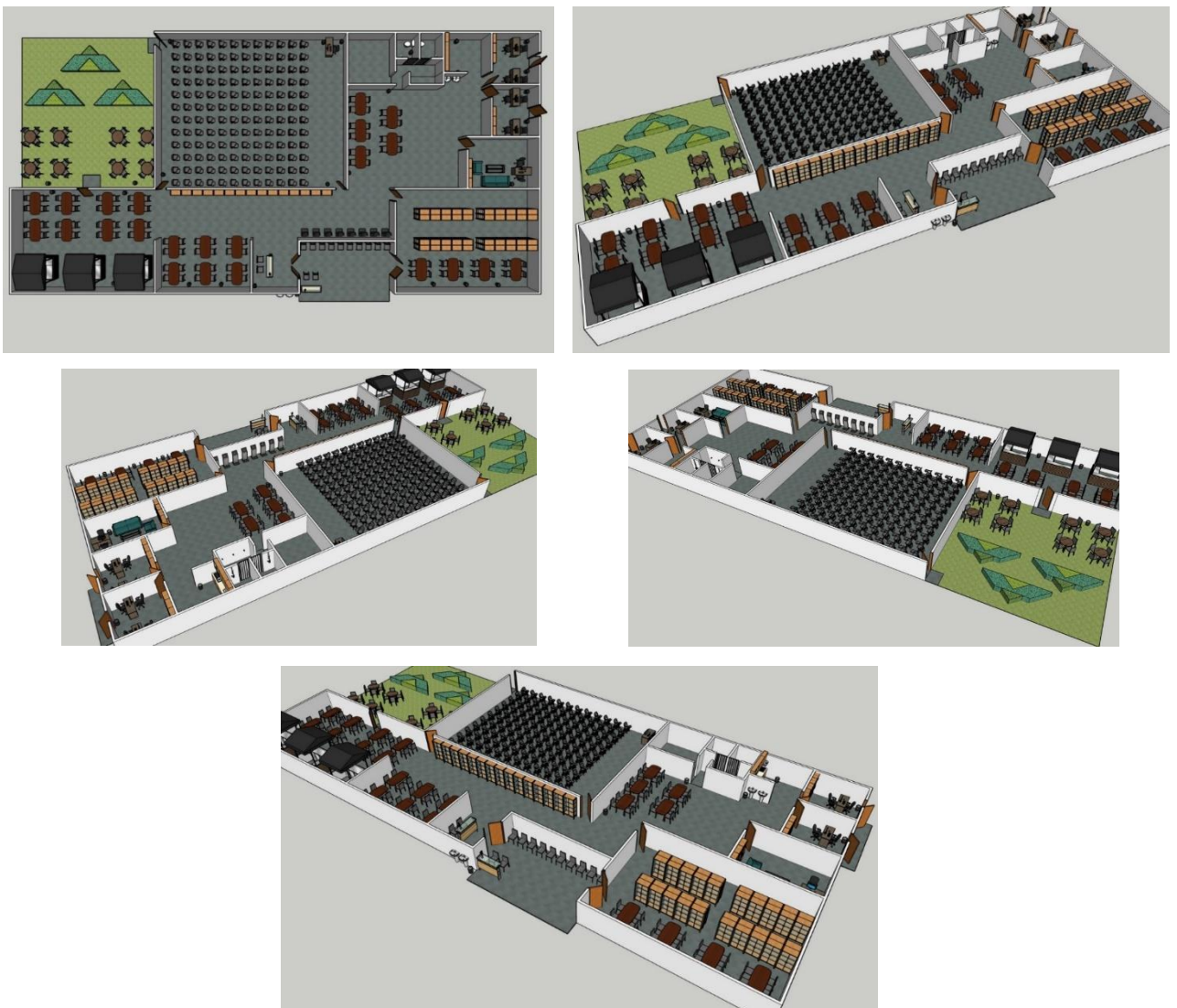
Dengan kebutuhan ruangan dan isinya, maka dirancang tata ruang atau lay out ruangan Kampung Beasiswa. Penyusunan Plan Gedung Kampung Beasiswa ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian membuat ruang-ruang sesuai keperluan kegiatan Kampung Beasiswa dan sesuai dengan ketersediaan *space* yang ada.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola “Kampung Beasiswa”



Gambar 2. Kondisi *existing lay-out*/tata ruang ruangan sebelum dirancang



Gambar 3. Kondisi *lay-out*/tata ruang ruangan setelah dirancang sesuai dengan kebutuhan ruang yang dibutuhkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, *Lay out* atau tata ruang (Gedung) Kampung Beasiswa dirancang dan disajikan sebagaimana disajikan pada gambar 3.

Langkah Implementasi. Beberapa Langkah implementasi yang perlu dilakukan adalah: 1) Membuat legalitas pemakaian Gedung Hall B PRSU sebagai KAMPUNG BEASISWA yang dikelola unit dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, melalui Perjanjian dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai pengelola areal PRSU; 2) Merekrut atau mengalokasikan pegawai sebanyak 8 orang, sesuai kebutuhan personil unit Pengelola kampung Beasiswa; 3) Menetapkan Pengelola KAMPUNG BEASISWA dan mengangkat personilnya, dengan menerbitkan SK Gubernur Sumatera Utara atau SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (sesuai kewenangan); 4) Merehab dan membangun ruang-ruang yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas Kampung Beasiswa sesuai dengan *lay out* atau tata ruang yang telah disusun; 5) Mengisi mebel, peralatan, bahan dan lainnya yang diperlukan pada setiap ruang sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang; 6) Melakukan aktifitas Kampung Beasiswa sesuai rancangan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas; serta, 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Monitoring dilakukan setiap minggu, evaluasi dilakukan setiap bulan, dan pelaporan dilakukan setiap triwulan.

KESIMPULAN

Konsep dan rancangan pembangunan Kampung Beasiswa yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi: pengertian untuk penyamaan persepsi, kejelasan tentang pemberi dan penerima beasiswa, kegiatan yang dibutuhkan, personil dan struktur organisasi unit pengelola, kebutuhan ruangan dan mobiler/peralatan, sampai dengan rancangan *lay-out* atau tata ruang tempat/lokasi Kampung Beasiswa tersebut. Kampung Beasiswa bertujuan untuk menyiapkan dan menyebarluaskan informasi tentang beasiswa, melakukan pelatihan bahasa Inggris dan memfasilitasi hingga beasiswa dapat direalisasikan bagi penduduk Sumatera Utara.

REKOMENDASI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara perlu merealisasikan Pembangunan Kampung Beasiswa ini sesegera mungkin agar mempercepat penerimaan manfaat bagi masyarakat calon penerima beasiswa, sekaligus mempercepat capaian yang

- ditargetkan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, sebagai salah satu prioritas pembangunan Sumatera Utara.
2. Dalam merealisasikan Kampung Beasiswa ini, Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara sebagai *leading sector* atau OPD yang akan mengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar melaksanakan langkah implementasi pembangunan Kampung Beasiswa yang disajikan di atas secara berurutan.
3. Untuk kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris dan/atau Komputer yang merupakan salah satu kegiatan utama Kampung Beasiswa, Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara agar segera mengadakan kerjasama dengan pihak yang mempunyai kompetensi sebagai penyelenggara Pelatihan Bahasa Inggris dan/atau Komputer, seperti Pusat Bahasa Universitas Negeri Medan, Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara, atau lembaga pelatihan swasta berkualitas lainnya yang ada di Kota Medan.
4. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Prov. Sumatera Utara dan Bappeda Prov. Sumatera Utara, agar mulai menjajaki dan membuat persiapan untuk pembangunan Laboratorium Bahasa Inggris/Asing yang representatif dan modern, dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau lembaga-lembaga donor serta konsultan atau pihak-pihak lain yang relevan dan kompeten, baik untuk pendanaan maupun untuk (terutama) keahlian/kualifikasi dalam pembangunan, peralatan dan pengoperasian Laboratorium Bahasa Inggris/Asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sumatera Utara (Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur) yang memberi peluang bagi penulis untuk menyusun konsep dan rancangan Kampung Beasiswa, serta kepada Bapak Kepala Bappeda Sumatera Utara beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara beserta jajaran, dan semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Yuusufa Ramanda Indra & Sukadana, I Wayam. 2016. Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 15(2) Desember 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumatera Utara. 2021. Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara. *Bahan rapat*. Medan. Bappeda Provsu.

Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Indonesia 2020. Jakarta. BPS.

Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara. 2021. Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020. Medan. BPS Sumut.

Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara. 2021. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka. Medan. BPS Sumut.

Dewi, Ni Ayu Krisna, Zuhri, Anjuman, Dunia, I Ketut. 2014. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha*. 4(1).

Jumadi, Jumadi. 2012. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Siswa Penerima Beasiswa. *Jurnal Istek*. 6(1-2).

Kalbar.antaraneews.com. 2013. Kemdikbud Luncurkan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Moelong, J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Solopos.com. 2013. Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun diluncurkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wassahua, Sarfa. 2016. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di kampong Wara Negeri Hative kecil Kota Ambon. *Al-iltizam*. 1(2).

Wikipedia. n. d. pengertian kampung. [Online] Dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung> [Diakses 14 Agustus 2021]